Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 6, Nomor 2, Desember 2025
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

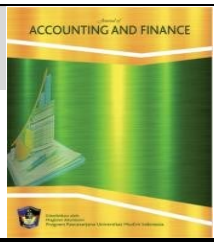

Mengukur Kinerja Keuangan Kota Semarang Periode Pandemi Covic-19 Tahun 2020-2022

Haryanto[1]
[1]*Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.*

haryanto@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Kota Semarang selama pandemi COVID-19 pada periode 2020 hingga 2022. Kinerja keuangan diukur berdasarkan pendapatan daerah dan belanja daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian terdiri dari laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang periode 2020–2022, yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk kinerja pendapatan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kisaran yang relatif tinggi. Di sisi lain, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kisaran yang relatif tinggi. Tren pendapatan daerah relatif mendatar dari tahun 2020 hingga 2021, kemudian meningkat dari tahun 2021 hingga 2022. Sementara itu, kinerja belanja daerah, sebagaimana terlihat dalam analisis varians, menunjukkan varians yang menguntungkan. Hasil analisis rasio konsistensi belanja daerah menunjukkan kecenderungan belanja operasional/rutin melebihi belanja modal. Tren belanja daerah mengikuti tren pendapatan daerah: relatif mendatar dari tahun 2020 hingga 2021, kemudian meningkat dari tahun 2021 hingga 2022.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Kota Semarang.*

ABSTRACT

This study aims to measure Semarang City's financial performance during the COVID-19 pandemic from 2020 to 2022. Financial performance was measured for regional revenue and regional expenditure. The analysis used in this study was quantitative descriptive. The research data consists of the Semarang City Government's financial reports for the 2020-2022 period, obtained from the BPS Central Java. The results of the study show that, in terms of regional revenue performance, the regional financial independence ratio is relatively high. On the other hand, the regional financial dependency ratio and the fiscal decentralisation ratio are relatively high. The trend in regional revenue flattened from 2020 to 2021, then increased from 2021 to 2022. Meanwhile, regional expenditure performance, as seen in the variance analysis, shows a favourable variance. The results of the regional expenditure consistency ratio analysis indicate that operational/routine expenditure tends to exceed capital expenditure. The trend in regional expenditure followed that of regional revenue: it flattened slightly from 2020 to 2021 and then increased from 2021 to 2022.

Keywords: *Financial Performance; Regional Revenue; Regional Expenditure; Semarang City.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi terhadap pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk memaksimalkan potensi kemampuan keuangan daerahnya Mardiasmo, (2016); Pemerintah Republik Indonesia, (2004). Dalam rangka memaksimalkan potensi kemampuan keuangan daerahnya upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada azas-azas pengelolaan keuangan yang memenuhi kriteria value for money serta akuntabel dan transparan Mardiasmo, 2018; Haryanto et al., (2017). Salah satu pijakan pengelolaan keuangan yang baik bertumpu pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangannya sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Indriana & Nasrun, (2019); Mahmudi, (2019a; 2019b); Mardiasmo, (2018). Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menjadi media untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu jenis laporan keuanganya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Posisi strategis Pemerintah Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menghadirkan lanskap fiskal dan keuangan daerah yang dinamis dan kompleks dalam rentang waktu 2020 hingga 2022, sebuah periode krusial yang merekam fase saat guncangan Pandemi Covid-19 Anisa & Haryanto, (2022). Merujuk pada publikasi data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, terdeteksi adanya rekonfigurasi yang signifikan dalam postur pendapatan daerah dan belanja daerah (BPS, 2021; 2023; 2024). Perubahan struktur ini memegang relevansi tinggi sebagai parameter evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kemandirian fiskal Pemerintah Kota Semarang (BPS, 2021; 2023; Digdowiseiso & Satrio, (2022). Sehubungan dengan konteks tersebut, analisis deskriptif kuantitatif menjadi sangat esensial untuk mengukur kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang dari berbagai instrumen pendapatan daerah dan belanja daerah dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Penelitian ini difokuskan untuk menilai kinerja keuangan Kota Semarang pada periode Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022. Selama periode Covid-19 tahun 2020-2022, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Semarang mengalami turbulensi penurunan anggaran yang mengakibatkan terjadi keterbatasan anggaran, namun pada saat bersamaan membutuhkan alokasi anggaran cukup untuk membiayai persoalan-persoalan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 (Anisa & Haryanto, 2022). Fenomena ini memberikan dampak pada kinerja keuangannya pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Semarang. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur ukuran kinerja keuangan daerah serta implikasi kebijakan keuangan daerah dimasa akan datang, terutama ketika pemerintah harus mengalami masa-masa seperti Pandemi Covid-19 (Anisa & Haryanto, 2022).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menata dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan (Fathirah et al., 2024). Penelitian ini menawarkan keaslian dengan mengintegrasikan konsep pengukuran kinerja keuangan dengan kemandirian

keuangan daerah. Sedikit penelitian sebelumnya yang mengukur kinerja keuangan dengan kemandirian keuangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada efek terpisah dari kinerja keuangan dengan kemandirian keuangan daerah.

Analisis Kinerja Keuangan: Analisis Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenanganya sebagai daerah otonom dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien dengan bertumpuh pada seluruh potensi yang dimilikinya Bahasoan et al., (2024); Mardiasmo, (2016). Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan potensinya berupa pendapatan daerah. Komponen utama pendapatan terdiri atas pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pendapatan yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Misra & Annisa, (2023); Sema & Riduwan, (2021); Saleh, (2020). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi PAD yang dimilikinya Nadofah, et al., (2025); Rieuwpassa et al., (2021); Saleh, (2020).

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan Pemerintah Republik Indonesia, (2006; 2010). Analisis atas laporan keuangan khususnya pendapatan daerah dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan mengerti kandungan informasi yang tercantum pada laporan keuangan. Analisis atas laporan keuangan menjadi media untuk menafsir dan memahami makna angka dan informasi pada laporan keuangan. Hasil analisis atas laporan keuangan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan Suryadi & Hukom, (2024); Mahmudi, (2019a; 2019b); Pemerintah Republik Indonesia, (2010). Pengukuran kinerja keuangan atas pendapatan daerah dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif cara, seperti menggunakan analisis varians, analisis rasio keuangan, dan value for money Suryadi & Hukom, (2024); Mahmudi, (2019a); Mardiasmo, (2018). Analisis rasio keuangan atas pendapatan daerah antara lain analisis rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio derajat desentrasi fiskal, rasio derajat kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) Arbani, (2020); Mahmudi, (2019a); (2019b); Halim, (2007).

Analisis rasio kemandirian keuangan digunakan untuk menilai tingkatan kemandirian keuangan pemerintah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pemberian layanan umum serta layanan atau urusan lainnya Maggara et al., (2024); Saragih & Nurlinda, (2023); Digdowiseiso & Satrio, (2022); Kristina et al., (2021). Pengukuran rasio kemandirian keuangan dilakukan dengan mengkomparasikan PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan yang tinggi menunjukan derajat kemandirian keuangan daerah yang tinggi Maharani & Haryanto, (2025); Mahmudi, (2019a). Pengukuran rasio ketergantungan keuangan dilakukan dengan memkomparasikan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan Mahmudi, (2019a). Rasio ketergantungan keuangan yang tinggi menunjukan derajat ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suryadi & Hukom, (2024); Sema & Riduwan, (2021); Arbani, (2020); Prasetyo & Rahayu, (2019). Pengukuran rasio efektivitas dilakukan dengan

memkomparasikan nilai realisasi dengan anggaran Mahmudi, (2019a). Pengukuran rasio efisiensi pajak daerah dilakukan dengan memkomparasikan biaya pemungutan dengan realisasi pajak daerah Maharani & Haryanto, (2025). Rasio efisien dinilai baik/efisien jika berada pada kisaran dibawah 10%. Pengukuran rasio derajat kontribusi BUMD dilakukan dengan membandingkan kontribusi/deviden dari BUMD dengan pendapatan Mahmudi, (2019a).

Analisis Kinerja Keuangan: Analisis Belanja Daerah

Analisis kinerja keuangan atas belanja daerah antara lain dilakukan dengan melakukan analisis varian belanja, analisis keserasian belanja, analisis rasio efisiensi belanja. Analisis varians atas belanja diukur dengan memkomparasikan antara realisasi dengan anggaran. Analisis keserasian belanja dilakukan dengan memkomparasikan antara komponen belanja tertentu dengan total belanja. Analisis rasio efisiensi belanja diukur dengan memkomparasikan antara kisaran persentase realisasi tertentu dengan anggaran belanja. Nilai efisiensi belanja akan dikategori efisien jika realisasinya mendekati 100% Mahmudi, (2019a; 2019b).

Dalam mengukur varian belanja terdapat selisih, yang dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu: (1) selisih yang diharapkan (favourable) dan (2) selisih yang tidak diharapkan Mahmudi, (2019a; 2019b). Analisis komposisi belanja operasi merupakan rasio yang mendeskripsikan perbandingan atau alokasi komponen belanja operasional (misalnya belanja pegawai) dengan total belanja operasional. Semakin tinggi persentase belanja pegawai terhadap todal belanja operasional maka semakin sedikit belanja yang dialokasi untuk belanja barang serta belanja modal Mahmudi, (2019a; 2019b).

Analisis Kinerja Keuangan: Perbandingan Kinerja Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Analisis perbandingan kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh belanja daerah. Analisis perbandingan kinerja ini dapat dipilah atas 2 (dua) kelompok yaitu (1) analisis perbandingan kinerja PAD dengan belanja daerah dan (2) analisis perbandingan kinerja PAD dengan belanja operasional. Analisis perbandingan kinerja PAD dan belanja menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah baik yang bersifat rutin (operasional) maupun non rutin seperti belanja modal dan belanja lainnya yang dananya bersumber dari realisasi PAD. Analisis perbandingan kinerja PAD dan belanja operasional menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja daerah yang bersifat rutin atau belanja operasional yang dananya bersumber dari realisasi PAD Mahmudi, (2019a; 2019b).

METODE PENELITIAN

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode untuk menggambarkan fenomena atau data secara sistematis, faktual, dan akurat menggunakan angka, tanpa bertujuan mencari penyebab atau menguji hipotesis, melainkan hanya memberikan gambaran karakteristik data atau variabel

melalui statistik seperti frekuensi, rata-rata (mean), persentase dan penyebaran data. Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan, mendeskripsikan, atau memaparkan suatu objek atau fenomena apa adanya berdasarkan data numerik. Data berupa angka, statistik, atau data terukur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 yang dikumpulkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPS, 2021; 2023; BPKAD, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kinerja Keuangan: Pendapatan Daerah

Hasil Rasio Kemandirian

Tabel 1. Hasil Rasio Kemandirian Tahun 2020-2022.

Tahun	Total Realisasi PAD	Total Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio
2020	2.024.537.808.307	2.230.424.054.663	90,77%
2021	2.385.944.758.477	2.320.535.370.128	102,82%
2022	2.545.991.747.658	2.423.149.928.403	105,07%

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian Kota Semarang tahun 2020-2021-2022 relatif cenderung meningkat. Rasio kemandirian keuangan Kota Semarang terendah terjadi tahun 2020 sebesar 90,77% dan rasio tertinggi terjadi tahun 2022 sebesar 105,07%. Nilai rasio kemandirian Pemerintah Kota Semarang relatif tinggi dan secara konstan terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2020-2022.

Tahun	Total Realisasi PAD	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio
2020	2.024.537.808.307	4.400.500.838.480	46,01%
2021	2.385.944.758.477	4.822.887.281.737	49,47%
2022	2.545.991.747.658	4.969.436.543.013	51,23%

Hasil analisis atas nilai rasio ketergantungan keuangan Kota Semarang selama tahun 2020-2022 relatif cenderung meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan ke tahun 2022. Rasio ketergantungan keuangan tertinggi terjadi tahun 2022 sebesar 51,23% dan rasio terendah tahun 2020 sebesar 46,01%. Nilai rasio ketergantungan keuangan Kota Semarang relatif tinggi dan secara konstan terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 dan 2022.

Hasil Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2020-2022.

Tahun	Total Realisasi PAD	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio
2020	2.024.537.808.307	4.400.500.838.480	46,01%

2021	2.385.944.758.477	4.822.887.281.737	49,47%
2022	2.545.991.747.658	4.969.436.543.013	51,23%

Hasil analisis atas rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Semarang tahun 2020-2022 relatif cenderung meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan ke tahun 2022. Rasio tertinggi terjadi tahun 2022 sebesar 51,23% dan terendah tahun 2020 sebesar 46,01%. Rasio derajat desentralisasi fiskal pada Pemerintah Kota Semarang relatif tinggi dan secara konstan terjadi peningkatan.

Hasil Rasio Efektivitas PAD

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022.

Tahun	Total Anggaran PAD	Total Realisasi PAD	Rasio
2020	1.889.598.813.000	2.024.537.808.307	107,14%
2021	2.607.693.085.682	2.385.944.758.477	91,50%
2022	2.533.643.457.802	2.545.991.747.658	100,49%

Nilai rasio efektivitas PAD Kota Semarang selama tahun 2020-2022 relatif tinggi. Nilai Rasio Efektivitas PAD tertinggi tahun 2020 sebesar 107,14% dan nilai rasio paling rendah tahun 2021 sebesar 91,50%. Nilai rasio efektivitas PAD pada Pemerintah Kota Semarang relatif tinggi hal ini berarti menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kota Semarang termasuk dalam kelompok sangat efektif.

Hasil Rasio Efisiensi PAD

Tabel 5. Rasio Efisiensi Tahun 2020-2022.

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Total Realisasi PAD	Rasio
2020	72.081.947.059	2.024.537.808.307	3,56%
2021	72.081.947.059	2.385.944.758.477	3,02%
2022	72.081.947.059	2.545.991.747.658	2,83%

Nilai rasio efisiensi PAD Kota Semarang tahun 2020-2022 relatif konstan, berubah sedikit dan cenderung melandai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Rasio efisiensi tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu sebesar 3,56% dan terendah terjadi tahun 2022 sebesar 2,83%. Secara keseluruhan selama periode 2020-2022 rasio efisiensi PAD Kota Semarang dapat dikategorikan dalam kelompok yang sangat efisien.

Hasil Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2020-2022.

Tahun	Total Anggaran Pajak Daerah	Total Realisasi Pajak Daerah	Rasio
2020	1.415.187.888.000	1.425.695.913.644	100,74%
2021	2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	71,66%
2022	1.937.950.180.074	1.956.226.658.076	100,94%

Rasio efektivitas pajak daerah Kota Semarang periode tahun 2020-2022 relatif fluktuatif. Rasio efektivitas pajak daerah tertinggi terjadi tahun 2022 sebesar 100,94% dan nilai rasio paling rendah terjadi tahun 2021 sebesar 71,66%. Rasio efektivitas

pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2021 turun secara tajam menjadi 71,66% atau turun sebesar 29,08% dibanding tahun 2020. Penurunan nilai rasio pajak daerah Kota Semarang relatif disebabkan oleh belum pulih perekonomian daerah sebagai dampak langsung terjadi Pandemi Covid-19. Penurunan pajak daerah terutama terjadi pada beberapa objek pajak, yaitu pajak restoran, pajak hotel dan pajak kesenian dan hiburan. Sebagaimana yang terjadi pada pemerintah daerah lainnya khususnya pemerintah kota lainnya, secara rata-rata mengalami penurunan penerimaan objek pajak restoran, pajak hotel, dan pajak kesenian dan hiburan. Secara rata-rata nilai rasio efektivitas pajak daerah Kota Semarang tahun 2020-2022 dapat dimasukkan dalam kelompok sangat efektif.

Hasil Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2020-2022.

Tahun	Realisasi Biaya Pemungutan	Realisasi Pajak Daerah	Rasio
2020	72.081.947.059	1.425.695.913.644	5,06%
2021	72.081.947.059	1.445.171.299.551	4,99%
2022	72.081.947.059	1.956.226.658.076	3,68%

Rasio efisiensi pajak daerah Kota Semarang selama periode tahun 2020-2022 cenderung menurun dari 5,06% menjadi 3,68%. Rasio efisiensi tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu 5,06% dan terendah terjadi tahun 2022 yaitu 3,68%. Rata-rata nilai rasio efisiensi pajak daerah Kota Semarang selama tahun 2020-2022 dapat dimasukkan dalam kelompok sangat efisiensi.

Hasil Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tabel 8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2020-2022.

Tahun	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio
2020	53.339.018.950	2.024.537.808.307	2,63%
2021	66.895.891.301	2.385.944.758.477	2,80%
2022	66.717.372.156	2.545.991.747.658	2,62%

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa rasio derajat kontribusi BUMD Kota Semarang tahun 2020-2022 relatif stabil. Rasio tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar 2,80% sedangkan paling rendah terjadi tahun 2022 sebesar 2,62%. Secara rata-rata nilai rasio derajat kontribusi BUMD Kota Semarang tahun 2020-2022 dapat dimasukkan dalam kelompok cukup tinggi.

Hasil Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Semarang periode 2020-2022 menunjukan nilai kisaran rasio sebesar 90,77% – 105,07%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok yang relatif tinggi. Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Semarang 2020-2022 berada pada kisaran 46,01 – 51,23%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok yang cukup tinggi. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kota

Semarang tahun 2020-2022 berada pada kisaran 46,01 – 51,23%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok yang cukup tinggi. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 berada pada kisaran 107,14% - 91,50%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok efektif. Rasio efisiensi PAD Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 berada pada kisaran 3,56% - 2,83%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok efisien. Rasio efektivitas pajak daerah Kota Semarang tahun 2020-2022 berada pada kisaran 100,94% - 71,66%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok cukup efektif. Rasio efisiensi pajak daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 berada pada kisaran nilai rata-rata sebesar 5,06% - 3,68%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok efisien. Rasio derajat kontribusi BUMD Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 berada pada kisaran 2,62% – 2,80%. Nilai rasio ini masuk dalam kelompok cukup tinggi.

Hasil Analisis Kinerja Keuangan: Belanja Daerah
Hasil Analisis Varians Belanja

Tabel 9. Analisis Varians Belanja Tahun 2020-2022.

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	Kinerja
2020	4.377.485.512.985	4.128.912.545.760	94,32%	*Favourable*
2021	5.336.565.925.505	4.764.045.946.156	89,27%	*Favourable*
2022	5.218.296.302.859	4.871.946.697.040	93,36%	*Favourable*
Rata-rata	4.977.449.247.116	4.588.301.729.652	92,18%	*Favourable*

Rata-rata anggaran belanja tahun 2020-2022 sebesar Rp4.977.449.247.116 dengan tingkat realisasi belanja sebesar Rp4.588.301.729.652 dan persentase varians 92,18%. Rata-rata varian belanja dapat dikelompokan dalam favourable varians.

Tabel 10. Analisis Varians Belanja Operasi Tahun 2020-2022.

Tahun	Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	(%)	Kinerja
2020	3.598.837.269.327	3.429.805.611.104	95,30%	*Favourable*
2021	4.105.719.754.215	3.781.987.198.191	92,12%	*Favourable*
2022	4.055.104.375.000	3.813.761.587.856	94,05%	*Favourable*
Rata-rata	3.919.887.132.847	3.675.184.799.050	93,76%	*Favourable*

Rata-rata anggaran belanja operasi tahun 2020-2022 sebesar Rp3.919.887.132.847 dengan tingkat realisasi belanja operasi sebesar Rp3.675.184.799.050 dan persentase varians 93,76%. Rata-rata varian belanja operasi dapat dikelompokan dalam favourable varians.

Tabel 11. Analisis Varians Belanja Modal Tahun 2020-2022.

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	%	Kinerja
2020	547.747.812.045	506.420.330.795	92,46%	*Favourable*
2021	1.181.452.834.129	953.669.847.701	80,72%	*Favourable*
2022	1.152.919.989.803	1.048.844.590.189	90,97%	*Favourable*

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	%	Kinerja
Rata-rata	960.706.878.659	836.311.589.562	87,05%	*Favourable*

Rata-rata anggaran belanja modal tahun 2020-2022 sebesar Rp960.706.878.659 dengan tingkat realisasi belanja modal sebesar Rp836.311.589.562 dan persentase varians 87,05%. Rata-rata varian belanja modal dapat dikelompokan dalam favourable varians

Hasil Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tabel 12. Realisasi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2022.

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	3.598.837.269.327	4.128.912.545.760	87,16%
2021	4.105.719.754.215	4.764.045.946.156	86,18%
2022	3.813.761.587.856	4.871.946.697.040	78,28%
Rata-rata	3.839.439.537.133	4.588.301.729.652	83,68%

Rata-rata anggaran belanja operasi tahun 2020-2022 sebesar Rp3.839.439.537.133 dengan tingkat realisasi belanja operasi sebesar Rp4.588.301.729.652 dan persentase varians 83,68%. Rata-rata varian belanja operasi dapat dikelompokan dalam favourable varians

Hasil Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tabel 13. Realisasi Belanja Modal Terhadap Total Realisasi Belanja Tahun 2020-2022.

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Realisasi Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2020	547.747.812.045	4.128.912.545.760	13,27%
2021	1.181.452.834.129	4.764.045.946.156	24,80%
2022	1.048.844.590.189	4.871.946.697.040	21,53%
Rata2	926.015.078.788	4.588.301.729.652	20,18%

Rata-rata perbandingan realisasi belanja modal dengan total belanja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2020-2022 sebesar 20,18%. Rata-rata realisasi belanja modal sebesar Rp926.015.078.788 sedangkan rata-rata realisasi total belanja daerahnya sebesar Rp 4.588.301.729.652. Rasio belanja modal mengalami fluktuasi berkisara antara 13–27%-24,80%. Belanja modal dalam penyelenggaraan pemerintahan dialokasikan untuk membiayai pembangunan fisik antara lain berupa tanah, gedung dan bangunan. Realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2020 relatif sangat rendah dibandingkan dengan data tahun 2021 dan 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2020 dilakukan refocusing yang relatif masif atas penganggaran belanja modal akibat terjadi Pandemi Covid-19.

Tabel 14. Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Total Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2022.

Tahun	Realisasi Belanja Pegawai (Rp)	Realisasi Total Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Operasi (%)
2020	1.508.689.799.304	3.598.837.269.327	41,92%
2021	1.708.462.916.083	4.105.719.754.215	41,61%
2022	1.569.996.280.372	3.813.761.587.856	41,17%
Rata-rata	1.595.716.331.920	3.839.439.537.133	41,57%

Perbandingan realisasi belanja pegawai dengan realisasi total belanja operasi di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2020-2022 sebesar 41,57%. Rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.595.716.331.920 sedangkan rata-rata realisasi total belanja operasi sebesar Rp3.839.439.537.133. Rasio belanja pegawai mengalami fluktuasi berkisar antara 41,92%-41,17% dan relatif mengalami trend/kecenderungan persentase penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 15. Realisasi Belanja Barang Terhadap Total Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2022.

Tahun	Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Realisasi Total Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Total Belanja Operasi (%)
2020	1.752.139.551.600	3.598.837.269.327	48,69%
2021	1.983.309.901.739	4.105.719.754.215	48,31%
2022	2.079.157.846.809	3.813.761.587.856	54,52%
Rata-rata	1.938.202.433.383	3.839.439.537.133	50,50%

Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja barang dan jasa terhadap realisasi total belanja operasi, rata-rata belanja barang dan jasa yang digunakan Kota Semarang pada tahun 2020-2022 sebesar 50,50%. Rata-rata realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2020-2022 sebesar Rp1.938.202.433.383 sedangkan rata-rata realisasi total belanja operasi selama tahun 2020-2022 sebesar Rp3.839.439.537.133. Rasio belanja barang dan jasa mengalami fluktuasi berkisar antara 48,31%-54,52% dan relatif mengalami trend/kecenderungan persentase meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Hasil Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Hasil analisis perbandingan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah baik yang bersifat rutin (belanja operasional) maupun non rutin (misalnya belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lainnya) yang dananya bersumber dari realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Total Belanja Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Daerah	Rasio
2020	2.024.537.808.307	4.128.912.545.760	49,03%
2021	2.385.944.758.477	4.764.045.946.156	50,08%
2022	1.956.226.658.078	4.871.946.697.040	40,15%
Rata-rata	2.122.236.408.287	4.588.301.729.652	46,42%

Berdasarkan hasil analisis realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap realisasi total belanja daerah, rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang untuk membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah pada tahun 2020-2022 sebesar 46,42%. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama tahun 2020-2022 sebesar Rp2.122.236.408.287 sedangkan rata-rata realisasi total belanja daerah selama tahun 2020-2022 sebesar Rp4.588.301.729.652. Rasio rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah mengalami fluktuasi berkisar antara 40,15%-50,08% dan relatif mengalami trend/kecenderungan persentase penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tabel 16 secara umum menunjukan bahwa secara rata-rata hanya 46.22% seluruh pengeluaran belanja daerah yang dapat dibiayai dari hasil realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Operasi

Hasil analisis perbandingan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang membiayai pengeluaran belanja daerah yang bersifat rutin atau belanja operasional yang dananya bersumber dari realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 17. Realisasi PAD Terhadap Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2022.

Tahun	Total Realisasi PAD	Total Realisasi Belanja Operasi	Rasio
2020	2.024.537.808.307	3.598.837.269.327	56,26%
2021	2.385.944.758.477	4.105.719.754.215	58,11%
2022	1.956.226.658.078	3.813.761.587.856	51,29%
Rata-rata	2.122.236.408.287	3.839.439.537.133	55,22%

Berdasarkan hasil analisis realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap realisasi total belanja operasi, rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang untuk membiayai belanja operasi pada tahun 2020-2022 sebesar 55,2%. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama tahun 2020-2022 sebesar Rp2.122.236.408.287 sedangkan rata-rata realisasi total belanja operasi selama tahun 2020-2022 sebesar Rp3.839.439.537.133. Rasio rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai belanja operasi mengalami fluktuasi berkisar antara 51,29%-58,11% dan relatif mengalami trend/kecenderungan persentase penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tabel 17 secara umum menunjukan bahwa secara rata-rata hanya 55.22% pengeluaran belanja rutin yang bersifat operasional yang dapat dibiayai dari hasil realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil analisis varians belanja daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 menunjukan variansi yang favourable. Artinya realisasi belanja daerah selama periode Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 memiliki kecenderungan nilai realisasi lebih kecil daripada nilai anggaran belanja daerah. Hasil analisis rasio keserasian belanja daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2020-2022 menunjukkan kecenderunga belanja operasional/rutin lebih besar daripada belanja modal. Artinya, semakin rendah persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional/rutin maka semakin besar persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat fasilitas umum serta fasilitas sosial yang semakin kecil (Mahmudi, 2019a; 2019b). Hasil ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Trend belanja daerah memiliki kecenderungan yang sama dengan pendapatan daerah yaitu turun dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan mulai naik dari tahun 2021 ke tahun 2022.

SIMPULAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kinerja keuangan Kota Semarang selama periode Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022. Pengukuran kinerja keuangan difokuskan pada perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah serta anggaran dan realisasi belanja daerah selama periode Pandemic Covid-19 Tahun 2020-2022. Penelitian ini juga mengukur kinerja rasio perbandingan sumber pembiayaan belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kinerja pendapatan daerah berupa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan nilai kisaran rasio yang relatif tinggi dan rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal relatif cukup tinggi. Analisis trend pendapatan daerah cenderung melandai dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan mulai naik dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sedangkan untuk kinerja belanja daerah berupa analisis varians menunjukan variansi yang favourable. Analisis trend belanja daerah memiliki kecenderungan yang sama dengan pendapatan daerah yaitu melandai dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan mulai naik dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Semarang adalah agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memperkuat proses pengelolaan pendapatan daerah seperti melakukan deregulasi pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan beberapa upaya atau strategi intensifikasi (optimalisasi potensi yang ada) dan ekstensifikasi (penggalian potensi baru), teknologi, serta tata kelola: (1) digitalisasi dan inovasi pelayanan pajak/retribusi dengan mengimplementasikan sistem pembayaran berbasis online (aplikasi e-tax), pengembangan aplikasi mobile pajak daerah, integrasi data wajib pajak/retribusi. Kemudian melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah berupa pemutakhiran data wajib pajak (updating data), penerapan opsen pajak, penagihan aktif piutang pajak. Untuk upaya ekstensifikasi dan peningkatan PAD dapat dilakukan upaya optimalisasi BUMD dengan melakukan evaluasi dan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan berkontribusi signifikan pada dividen daerah. Selanjutnya dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengembangan sektor wisata dan parker. Selain itu, Pemerintah Kota

Semarang melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan aparatur. Serta langkah berikut dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan meningkatkan tata kelola dan kepatuhan berupa penyusunan prosedur tertulis (standar operasional prosedur/SOP) dan penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan audit rutin terhadap kinerja pengelola pendapatan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa memberatkan masyarakat (fokus pada kepatuhan dan efisiensi). Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Semarang untuk peningkatan belanja daerah yaitu agar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran belanja modal dengan mengalokasi dana untuk sarana prasarana dan fasilitas umum serta fasilitas sosial. Pemerintah Kota Semarang dapat mengeser alokasi penganggaran belanja operasional ke belanja modal dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja operasional/rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. F. N., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25545

Anisa, I. M., & Haryanto. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. Jurnal Akuntansi Aktual, 9(1). http://dx.doi.org/10.17977/um004v9i12022p077

Arbani, T. S. (2020). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Ketergantungan Pemerintah Daerah. Al-'Adl, 13(1), 94-106. https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1679

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 43-46. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V8i1.1119

BPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. (2024). Pelaporan dan Pertanggungjawaban. https://bpkad.semarangkota.go.id/page/pelaporan-dan-pertanggungjawaban

BPS. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2018-2020. Retrieved from https://jateng.bps.go.id/id/publication/2021/12/08/0c90213f146cc10d07668037/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-dan-kab-kota-se-jawa-tengah-2018-2020.html

BPS. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2021-2022. Retrieved from https://jateng.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/1dc20d05e362743ea9960ed8/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-2021-2022.html

BPS. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2022-2023. https://jateng.bps.go.id/id/publication/2024/12/24/227abc8e1e57b8748e6d4dc8/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-2022-dan-2023.html

Chabibillah, A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://eprints.ums.ac.id/view/creators/Chabibillah=3AAhmad=3A=3A.html

Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(3), 1170-1181. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1167

Fathirah, D., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. Asian Journal of Management Analytics, 3(4), 1171–1184. https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878

Halim, A. (2007). Manajemen Keuangan Daerah. 3rd ed. Yogyakarta: Badan Penerbit UPP AMP YKPN

Haryanto, Ofifah, D. N., Warsito, K., & Shiddiq, N. R. (2023). Characteristics and Disclosure of Local Government Financial Statements. Jurnal Akuntansi Aktual, 10(1), 10-23. http://dx.doi.org/10.17977/um004v10i12023p010

Haryanto, Sahmudin, & Mannan, A. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: BP Undip Press. https://www.researchgate.net/publication/344618308_Akuntansi_Sektor_Publik

Haryanto. (2023). Determinants of the Reliability of SKPD Financial Statements. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 14 (2), 219-233. https://doi.org/10.26740/jaj.v14n2.p219-233.

Indriana, I., & Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 8(1), 19-26 https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.330

Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1). DOI: 10.35794/Emba.V9i1.32235

Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat dan Dampaknya pada Kemandirian Fiskal. Jurnal Manajemen Dinamis, 6(4), 34-46. https://journalversa.com/s/index.php/jmd/article/view/3211/3691

Maharani, Z. P., & Haryanto, H. (2025). Pengaruh PAD dan Dana Transfer Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 14(3). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/52952

Mahmudi. (2019a). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019b). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. (2016). Globalisasi Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, dan Otonomi Daerah. Economic Journal of Emerging Markets, 5(1), 1–14. Https://Doi.Org/10.20885/Ejem.V5i1.6895

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Ed Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Misra, S., & Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kendali Akuntansi, 1(2): 98-111. https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.199

Nadofah, N., Jaenudin, M., & Utami, A. F. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Indonesia: Evaluasi 38 Provinsi Dalam Era Desentralisasi. Dinamika

Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(1), 34-46. https://doi.org/10.33005/jdg.v15i1.5081

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.https://peraturan.bpk.go.id/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010

Prasetyo, A., & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian Di Provinsi Kalimantan Selatan. Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 2(4), 872-881. https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2328

Rieuwpassa, A. R., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah di Tiga Kota di Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon). Jurnal EMBA, 9(1), 378–385. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32186

Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 15(2), 111-134. https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226

Saragih, R., & Nurlinda, N. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Pada Kabupaten Tapanuli Utara Dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi), 6(2), 1-11. DOI: https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810

Sema, L. J., & Riduwan, A. (2021). Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira), 10(5), 1-22. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3985/3996

Suryadi, H., & Hukom, A. (2024). Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2(3), 48–56. Https://Doi.Org/10.61132/Menawan.V2i3.513